



Tindakan Diskriminatif Terhadap Minoritas Muslim Era Pemerintahan Narendra Modi di India

Ardila Maulida

UIN Sunan Ampel Surabaya

ardilamaulida27@gmail.com

Devi Asri Rochmatillah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Devi.asrir18@gmail.com

Nita Setiawati

UIN Sunan Ampel Surabaya

setianita32@gmail.com

Abstract: This study examines the dynamics of Islamic politics in India within the context of Narendra Modi's government, focusing on the increase in discriminatory actions against the Muslim minority community. The Modi administration, supported by the Bharatiya Janata Party (BJP), is often associated with policies perceived to reinforce Hindu nationalism, raising concerns about the erosion of minority rights, particularly for Muslims. This article explores various policies and events that reflect structural discrimination, including citizenship amendments, changes in policing policies, and the rise in incidents of communal violence. Using a qualitative approach, the research analyzes secondary data from human rights reports, academic studies, and public statements to assess the impact of Modi's policies on the welfare and rights of India's Muslim citizens. Findings indicate that the political agenda promoted by the Modi administration not only has the potential to strengthen anti-Muslim sentiment but also poses a threat to pluralism and social stability in India. This article seeks to provide an in-depth perspective on the role of government policy in shaping inter-community relations in India and the relevance of this phenomenon within the discourse on Islamic politics and global human rights.

Keywords: Islamic Politics, Narendra Modi, discrimination, Muslim minority, Hindu nationalism, India.

Abstrak: Penelitian ini membahas tindakan diskriminatif terhadap komunitas minoritas muslim. Pemerintahan Modi, yang didukung oleh Partai Bharatiya Janata (BJP), seringkali dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap memperkuat nasionalisme Hindu, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang penurunan hak-hak minoritas,

khususnya Muslim. Artikel ini mengeksplorasi berbagai kebijakan dan peristiwa yang mencerminkan diskriminasi struktural, termasuk amandemen kewarganegaraan, perubahan kebijakan kepolisian, serta meningkatnya insiden kekerasan komunal. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis data sekunder dari laporan hak asasi manusia, studi akademik, dan pernyataan publik untuk mengevaluasi dampak kebijakan Modi terhadap kesejahteraan dan hak-hak warga Muslim India. Temuan menunjukkan bahwa politik yang diusung oleh pemerintahan Modi mengancam pluralisme dan stabilitas sosial di India. Artikel ini berupaya memberikan wawasan mendalam mengenai peran kebijakan pemerintah dalam membentuk hubungan antar-komunitas di India, serta relevansi fenomena ini dalam diskursus politik Islam dan hak asasi manusia global.

Kata Kunci: Politik Islam, Narendra Modi, diskriminasi, minoritas Muslim, nasionalisme Hindu, India

Pendahuluan

Hubungan antara agama dan negara telah lama menjadi subjek perdebatan yang signifikan, baik di kalangan pemikir Islam klasik maupun modern. Meskipun telah ada berbagai pandangan mengenai integrasi atau pemisahan keduanya, hal ini tetap menjadi sesuatu yang kompleks dan belum terpecahkan secara tuntas. Islam sebagai sistem kepercayaan, secara tradisional dipandang sebagai agama yang tidak hanya mencakup aspek spiritual tetapi juga sosial, politik, dan kenegaraan. Banyak pemikir Islam yang menyatakan bahwa agama dan negara dalam Islam tidak bisa dipisahkan, sebagaimana terlihat pada masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah yang menggabungkan fungsi keagamaan dan kenegaraan. Paradigma ini menekankan kedaulatan Tuhan sebagai sumber legitimasi kekuasaan yang biasa dianut oleh kelompok Syi'ah, kelompok tersebut percaya bahwa legitimasi politik harus bersumber dari garis keturunan Nabi Muhammad. Di sisi lain, dalam konteks negara modern seperti di India yang dipimpin oleh pemerintahan Narendra Modi, persoalan ini muncul dalam bentuk yang berbeda. Pemerintahan Modi dikenal dengan kebijakan yang mengutamakan nilai-nilai Hindu, yang telah menyebabkan meningkatnya diskriminasi terhadap minoritas Muslim. Diskriminasi ini menjadi sangat relevan ketika dianalisis melalui lensa hubungan agama dan negara dalam Islam. Di mana negara mengedepankan satu agama tertentu yang cenderung mengabaikan hak-hak minoritas. (Hamzani and Aravik 2021)

Sejak Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2014, diskriminasi terhadap komunitas Muslim semakin menunjukkan peningkatan signifikan. Modi, yang didukung oleh partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP), membawa ideologi Hindutva yang mengedepankan nasionalisme Hindu sebagai landasan utama pemerintahannya. Pendekatan ini berdampak serius terhadap kohesi sosial di antara komunitas Hindu dan Muslim di India, memperburuk ketegangan etnis dan memicu berbagai bentuk kekerasan komunal yang semakin sulit dikendalikan. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Modi yang dinilai bias dan diskriminatif terhadap komunitas Muslim, seperti Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA), semakin mempertegas marginalisasi Muslim di India. CAA, yang disahkan pada 2019, memberikan kemudahan bagi imigran non-Muslim dari negara-negara tetangga untuk mendapatkan kewarganegaraan India, sementara komunitas Muslim terabaikan. Dampak dari kebijakan ini menciptakan kesenjangan sosial dan memperkuat sentimen anti-Muslim di kalangan mayoritas Hindu. CAA juga menuai kritik dari kalangan internasional karena dianggap mencederai nilai-nilai kesetaraan kewarganegaraan dan hak asasi manusia yang seharusnya diakui secara universal. Fenomena diskriminasi ini pada akhirnya menjadikan India sebagai negara yang semakin tidak aman bagi minoritas Muslim yang membutuhkan perlindungan hukum dan sosial dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. (Az-zahra 2022)

Fenomena diskriminasi terhadap komunitas Muslim di India ini tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga menarik perhatian komunitas internasional yang prihatin terhadap hak asasi manusia. Salah satu organisasi internasional yang memberikan perhatian khusus adalah Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang selama ini berkomitmen untuk melindungi hak-hak umat Muslim di seluruh dunia. OKI, sebagai organisasi internasional yang mewakili kepentingan umat Muslim, mengambil langkah-langkah proaktif dalam menangani diskriminasi yang terjadi di India. Meski India bukan anggota OKI, organisasi ini tetap melakukan berbagai upaya melalui pelaporan, seminar, serta konvensi internasional sebagai bentuk advokasi untuk mengakhiri diskriminasi yang dialami oleh komunitas Muslim. OKI juga secara konsisten berupaya menggunakan platform diplomasi untuk mendorong pemerintah India agar menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia bagi seluruh warganya, tanpa

memandang latar belakang agama. Walaupun keterlibatan OKI dalam menangani diskriminasi ini dihadapkan pada tantangan besar karena India bukan anggota, keberadaan OKI tetap penting sebagai suara kolektif umat Muslim di dunia. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan yang dialami komunitas Muslim serta membangun kesadaran global untuk terus mendesak India agar menghentikan tindakan diskriminatif terhadap minoritas Muslim di negara tersebut. (Az-zahra 2022)

Sebagai organisasi internasional dengan otoritas moral yang kuat, OKI memiliki peran strategis dalam menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh komunitas Muslim di India. Melalui legitimasi dan kredibilitasnya, OKI memanfaatkan kekuatan diplomasi dan advokasi internasional untuk memberikan tekanan kepada pemerintah India. OKI bertujuan agar hak-hak minoritas Muslim diakui serta dilindungi secara hukum dan sosial. OKI juga menggalang dukungan dari negara-negara anggotanya guna mempromosikan dialog antaragama sebagai upaya untuk mencapai perdamaian dan meredakan ketegangan komunal di India. Selain itu, OKI secara konsisten menyampaikan laporan mengenai berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami komunitas Muslim di India, baik dalam forum internasional maupun kepada masyarakat global. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari advokasi berbasis bukti untuk meningkatkan kesadaran internasional terhadap isu-isu diskriminasi agama yang semakin memprihatinkan. Pengaruh OKI dalam menangani isu ini mungkin tidak langsung terlihat, karena bergantung pada kesediaan pemerintah India untuk merespons rekomendasi dan tekanan internasional. Namun, langkah-langkah yang diambil OKI diharapkan mampu membangkitkan solidaritas global dan menekan India untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakannya terhadap komunitas Muslim, yang selama ini mengalami marginalisasi dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara politik Islam dan kebijakan pemerintah Narendra Modi, khususnya terkait dengan peningkatan tindakan diskriminatif terhadap minoritas Muslim di India. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang mencakup buku, artikel ilmiah, laporan lembaga internasional, serta berita dan dokumen yang terkait dengan kebijakan pemerintah India, seperti

Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA) dan kebijakan lainnya yang berdampak pada Muslim. (Mahanun 2016) Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi yang memungkinkan peneliti untuk menafsirkan teks dan mengidentifikasi pola-pola diskriminasi dalam kebijakan dan praktik pemerintah. Penelitian ini juga memanfaatkan teori islamofobia untuk mengkaji sejauh mana prasangka dan diskriminasi terhadap Muslim muncul dalam kebijakan Modi serta dampaknya terhadap minoritas Muslim. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana islamofobia sebagai bentuk prasangka terhadap Islam dan Muslim mempengaruhi kebijakan negara dan memperburuk kondisi sosial-politik bagi minoritas Muslim di India. Teori islamofobia lebih sesuai karena berfokus pada sikap, kebijakan, dan perilaku diskriminatif yang ditujukan kepada Muslim berdasarkan prasangka atau stereotip negatif terkait Islam, yang relevan dalam menganalisis kebijakan diskriminatif seperti CAA dan kebijakan serupa di India.

Hasil dan Disukusi

Posisi Penulis

Dalam jurnal Islamophobia dan Strategi Mengatasinya, Moordiningsih mendefinisikan islamofobia sebagai fenomena sosial yang terdiri dari ketakutan, prasangka, dan diskriminasi terhadap Islam dan umat Muslim. Islamofobia tidak hanya dipahami sebagai sikap individu, tetapi juga telah menjadi prasangka kolektif yang terwujud dalam kebijakan publik, lembaga sosial, dan wacana sosial yang sering kali meminggirkan Muslim dalam masyarakat. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan, baik secara hukum, sosial, maupun politik, dengan cara menciptakan marginalisasi terhadap kelompok Muslim dan membatasi akses mereka terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara. Di India, teori islamofobia dapat digunakan untuk menganalisis sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Narendra Modi, terutama Undang-Undang Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act atau CAA). CAA dianggap diskriminatif karena memberikan kemudahan kewarganegaraan bagi imigran non-Muslim dari negara-negara tetangga, sementara Muslim dikecualikan dari perlakuan yang sama. Hal ini menunjukkan adanya islamofobia yang dilembagakan, di mana prasangka dan diskriminasi terhadap Muslim telah terstruktur dalam kebijakan negara, memperburuk kondisi minoritas Muslim di India. (Moordiningsih 2015)

Pendekatan islamofobia dalam menganalisis kebijakan pemerintah Modi memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam tentang adanya diskriminasi terstruktur terhadap Muslim di India yang didasarkan pada prasangka keagamaan. Kebijakan-kebijakan ini tampaknya bertujuan untuk mengonsolidasikan identitas nasional yang berakar pada agama mayoritas, yakni Hindu, yang secara tidak langsung memposisikan Muslim sebagai "yang lain" atau ancaman bagi stabilitas nasional. Perspektif islamofobia ini membantu mengungkapkan bahwa tindakan diskriminatif terhadap Muslim di India bukan hanya sekadar akibat dari dinamika politik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi politik identitas yang dimanfaatkan oleh pemerintahan Modi untuk mengukuhkan basis dukungan dari mayoritas populasi. Dengan menggunakan teori islamofobia, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah India bukan sekadar bersifat administratif, tetapi mencerminkan bias agama yang memperburuk ketidakadilan terhadap Muslim. Islamofobia di India tampaknya merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan politik, agama, dan ideologi nasionalis yang mempromosikan eksklusivitas berbasis agama. Teori ini tidak hanya menjelaskan bias dalam kebijakan negara, tetapi juga menyoroti islamofobia sebagai alat politik yang digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah, yang berdampak besar pada kondisi sosial dan politik minoritas Muslim di India.

Kebijakan Pemerintahan Narendra Modi yang Berpotensi Diskriminatif

Pemerintahan Narendra Modi, yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP), telah mengimplementasikan beberapa kebijakan yang dianggap berpotensi diskriminatif, terutama terhadap komunitas Muslim di India. Beberapa kebijakan ini telah menimbulkan kekhawatiran terkait penurunan hak-hak minoritas, memperkuat sentimen nasionalisme Hindu, dan mengancam pluralisme sosial di India. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dianggap kontroversial dan berpotensi diskriminatif:

1. Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act - CAA) 2019

CAA memberikan kewarganegaraan kepada imigran non-Muslim dari tiga negara tetangga (Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh) yang datang ke India sebelum tahun 2014. Kebijakan ini menuai kritik tajam karena dianggap

diskriminatif terhadap Muslim, karena tidak memberikan perlindungan yang sama bagi imigran Muslim dari negara-negara tersebut. Banyak yang melihat CAA sebagai bentuk pengucilan terhadap komunitas Muslim, yang mengarah pada klaim bahwa pemerintah Modi memprioritaskan kelompok non-Muslim dalam kebijakan kewarganegaraan. (Jha 2020)

2. Penghapusan Status Khusus Jammu dan Kashmir (Artikel 370) 2019

Pada Agustus 2019, pemerintah Modi mencabut status khusus Jammu dan Kashmir yang sebelumnya diberikan berdasarkan Artikel 370 Konstitusi India. Kebijakan ini mengubah status politik dan sosial wilayah tersebut, yang sebagian besar berpenduduk Muslim, dan memicu ketegangan etnis dan sektarian. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memajukan integrasi dan pembangunan, banyak pihak yang melihatnya sebagai langkah yang memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dengan komunitas Muslim di wilayah tersebut. (Kaur 2014)

3. Perubahan Kebijakan Kepolisian dan Penggunaan Kekerasan Terhadap Demonstrasi

Pemerintahan Modi juga mendapat sorotan atas penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam menanggapi protes terkait CAA dan kebijakan lainnya. Demonstrasi besar-besaran pada akhir 2019 dan awal 2020, yang menentang CAA, sering berakhir dengan bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa, yang sebagian besar berasal dari komunitas Muslim. Kritik datang karena aparat kepolisian dianggap tidak adil dalam menangani protes yang mayoritas dilakukan oleh Muslim, bahkan dalam beberapa kasus, aparat keamanan dituduh menggunakan kekuatan berlebihan. (Khan 2015)

4. Kebijakan Pendidikan dan Ekonomi yang Merugikan Minoritas

Beberapa kebijakan pemerintahan Modi juga dianggap tidak mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial komunitas Muslim. Misalnya, dalam sektor pendidikan, keberadaan kebijakan yang memprioritaskan kelompok Hindu dalam pendidikan dan pekerjaan sering kali mengabaikan hak-hak Muslim untuk mendapatkan akses yang setara. Kebijakan ekonomi yang tidak merata, yang lebih menguntungkan mayoritas Hindu, turut memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi bagi Muslim. (Islam 2024)

Peran Ideologi Hindutva dalam Politik Pemerintahan Modi

Ideologi Hindutva memainkan peran penting dalam kebijakan pemerintahan Narendra Modi sejak ia menjabat sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2014. Hindutva adalah bentuk nasionalisme Hindu yang menekankan identitas Hindu sebagai elemen kunci dalam pembangunan bangsa India. Ideologi ini berupaya mengubah India dari negara sekuler menjadi negara yang mengedepankan nilai-nilai Hindu, dan melalui partai politik Bharatiya Janata (BJP), Hindutva menjadi landasan kebijakan pemerintahan Modi. Dalam konteks pemerintahan saat ini, Hindutva tidak hanya mengubah arah kebijakan domestik, tetapi juga berdampak pada hubungan diplomatik India, terutama dengan negara-negara mayoritas Muslim seperti Pakistan.(Asy'ari 2024) Pada tingkat domestik, pengaruh ideologi Hindutva terlihat dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Modi, termasuk dalam pengesahan Citizenship Amendment Act (CAA) pada tahun 2019. Undang-undang ini memungkinkan minoritas non-Muslim dari negara-negara tetangga seperti Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh untuk mendapatkan kewarganegaraan India. Namun, Muslim tidak termasuk dalam kategori minoritas yang dilindungi oleh CAA, sehingga undang-undang ini dianggap diskriminatif terhadap mereka. CAA memicu protes besar-besaran di seluruh India karena dianggap sebagai upaya untuk meminggirkan populasi Muslim dan menguatkan dominasi Hindu di negara tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk memanfaatkan nilai-nilai Hindutva untuk membatasi hak-hak minoritas Muslim serta mengubah keseimbangan demografis dengan memperkuat populasi Hindu. Dalam hal ini, Hindutva berfungsi sebagai alat politik yang digunakan oleh pemerintah untuk memperkuat dominasi Hindu di India dengan mengorbankan prinsip sekularisme yang menjadi dasar konstitusi.(Asy'ari 2024)

CAA adalah salah satu kebijakan yang memperlihatkan bagaimana Hindutva digunakan untuk menciptakan eksklusivitas agama di India. Selain diskriminatif, kebijakan ini juga mempertegas pandangan BJP bahwa India adalah negara yang dikhususkan untuk umat Hindu. Hal ini memicu kritik dari berbagai kelompok, termasuk aktivis hak asasi manusia dan organisasi internasional yang menilai bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan asas kesetaraan dan inklusivitas. Selain itu, kebijakan ini menimbulkan polarisasi sosial di India, di mana kelompok Hindu dan Muslim semakin terpisah akibat isu identitas agama yang dipicu oleh kebijakan pemerintah.

CAA bukan hanya sekadar kebijakan imigrasi, tetapi juga sebuah pernyataan politik yang menunjukkan bagaimana pemerintahan Modi menggunakan Hindutva untuk memengaruhi identitas nasional India. (Sukma and Asy'ari 2024) Pengaruh Hindutva dalam pemerintahan Modi juga terlihat dalam kebijakan luar negeri, khususnya dalam hubungan India dengan Pakistan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu isu utama yang meningkatkan ketegangan antara kedua negara adalah sengketa wilayah Kashmir. Pada tahun 2019, pemerintahan Modi mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir, sebuah langkah yang sejalan dengan pandangan Hindutva bahwa Kashmir adalah bagian integral dari wilayah Hindu. Kebijakan ini menciptakan ketegangan di wilayah tersebut dan memicu protes dari warga Kashmir yang mayoritas Muslim. Pakistan, yang menganggap dirinya sebagai pelindung komunitas Muslim di Kashmir, mengecam tindakan India ini sebagai bentuk penindasan terhadap populasi Muslim di wilayah tersebut.

Hubungan antara India dan Pakistan semakin memburuk, dan ketegangan terus meningkat akibat kebijakan agresif yang dipengaruhi oleh ideologi Hindutva. (Sukma and Asy'ari 2024) Dengan mencabut status otonomi khusus Kashmir, Modi memperlihatkan komitmennya terhadap ideologi Hindutva yang menginginkan integrasi penuh wilayah tersebut ke dalam India. Langkah ini merupakan bentuk nasionalisme Hindu yang memandang Kashmir sebagai wilayah Hindu yang seharusnya berada di bawah kendali penuh pemerintahan India. Kebijakan ini tidak hanya memicu konflik dengan Pakistan tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan di Kashmir, di mana penduduk setempat harus menghadapi pembatasan keamanan yang ketat dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan. Dalam hal ini, ideologi Hindutva berfungsi sebagai pendorong untuk kebijakan luar negeri yang agresif, yang berisiko menciptakan ketidakstabilan di kawasan Asia Selatan. (Sukma and Asy'ari 2024)

Pengaruh Hindutva dalam pemerintahan Modi juga berdampak luas pada demokrasi dan nilai-nilai sekularisme di India. Ideologi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang semakin memperkuat dominasi Hindu dan meminggirkan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Melalui kebijakan-kebijakan seperti CAA dan penarikan status otonomi Kashmir, ideologi Hindutva menjadi alat bagi pemerintahan Modi untuk membangun sebuah India yang didefinisikan oleh identitas Hindu yang

dominan. Hal ini membawa konsekuensi serius bagi keragaman budaya dan keagamaan di India, serta mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan inklusivitas (Nahla Wahdatan Nasrah Asy'ari 2023). Secara keseluruhan, peran Hindutva dalam pemerintahan Modi mencerminkan pergeseran politik India dari sekularisme menuju nasionalisme berbasis agama. Kebijakan yang diterapkan menunjukkan bahwa pemerintahan Modi menggunakan ideologi ini sebagai kerangka untuk membatasi hak-hak minoritas, memperkuat dominasi Hindu, dan menciptakan eksklusivitas agama di ruang publik. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada dinamika domestik tetapi juga berimplikasi pada stabilitas kawasan, terutama dalam hubungan India dengan negara-negara mayoritas Muslim. Dengan semakin kuatnya peran Hindutva dalam pemerintahan Modi, masa depan demokrasi sekuler di India berada dalam ancaman, di mana prinsip-prinsip kesetaraan dan keragaman semakin terkikis oleh dominasi nilai-nilai Hindu. (Nahla Wahdatan Nasrah Asy'ari 2023)

Peningkatan Islamofobia dalam Masyarakat India

Islamofobia di India memiliki akar sejarah yang panjang dan sudah ada sejak masa kekuasaan Kekaisaran Mughal pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Pada masa itu, umat Islam yang berkuasa di India sering kali menindas masyarakat Hindu. Ketika Inggris berhasil merebut kekuasaan pada abad ke-18, situasi berubah dengan adanya pergeseran sikap yang lebih mendukung umat Hindu. Inggris melihat umat Islam sebagai ancaman, sedangkan umat Hindu dianggap lebih mudah beradaptasi dengan pemerintahan kolonial. Kebijakan pemisahan antara umat Hindu dan Islam yang diterapkan oleh Inggris selama masa kolonial ini menciptakan ketegangan yang berlangsung lama. Ketegangan tersebut tidak hanya mengarah pada permusuhan sosial, tetapi juga pada pemisahan politik, yang akhirnya memunculkan pembentukan negara Pakistan pada tahun 1947. Ketegangan ini berlanjut hingga hari ini, memicu perbedaan sikap terhadap kelompok Muslim di India yang terus diperburuk oleh stigma sosial yang berkembang.

Ketegangan yang ada antara umat Hindu dan Muslim di India semakin kompleks, dengan adanya narasi bahwa umat Islam merupakan 'kelompok lain' yang berbeda. Stigma ini berakar dalam perbedaan cara hidup yang mencolok antara keduanya, termasuk pandangan terhadap sapi yang dianggap sakral oleh umat Hindu. Tuduhan terhadap umat Islam bahwa mereka membunuh sapi sering kali menjadi dasar untuk kekerasan terhadap mereka.

Kekerasan semacam ini diperparah dengan adanya kelompok ekstrimis Hindu yang mempromosikan narasi anti-Islam dan memperkenalkan tindakan kekerasan sebagai pembenaran atas keyakinan mereka. Seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok ini berhasil menanamkan ideologi mereka ke dalam masyarakat melalui berbagai bentuk propaganda, termasuk media sosial dan media cetak. Terlebih lagi, kemenangan Partai Bharatiya Janata (BJP) pada pemilihan umum 2019 telah mengokohkan ideologi Hindutva, yang mendukung pendirian negara yang berlandaskan pada agama Hindu. Ideologi ini semakin memperburuk kondisi minoritas Muslim, yang dianggap tidak layak menjadi bagian dari negara India karena keyakinan mereka yang berbeda. Peningkatan kebencian terhadap umat Islam tercermin dalam aksi-aksi kekerasan dan diskriminasi yang terjadi secara terstruktur, baik di tingkat masyarakat maupun di pemerintahannya. (Damayanti, Robertua, and Mulyaman 2022)

Penyebaran sentimen Islamofobia di India semakin nyata setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif, seperti Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA) dan National Register of Citizens (NRC). CAA, yang diimplementasikan pada tahun 2020, memberikan kewarganegaraan kepada kelompok minoritas agama dari negara-negara tetangga, namun mengecualikan umat Muslim. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya sistematis untuk mengurangi populasi Muslim di India dan memperburuk posisi mereka sebagai warga negara. Selain itu, kebijakan ini memicu protes besar di kalangan masyarakat, namun pemerintah dan partai yang berkuasa, BJP, tidak menunjukkan kesediaan untuk mengubah kebijakan tersebut. Ketidakadilan terhadap umat Islam semakin diperburuk dengan adanya kelompok radikal Hindu yang terus mengobarkan kebencian dan kekerasan terhadap mereka. Serangan terhadap umat Islam tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat umum, tetapi juga didorong oleh elite politik yang mendukung ideologi Hindutva. Dalam konteks ini, India menghadapi ancaman serius terhadap pluralitas dan toleransi agama, yang menjadi landasan bagi keberagaman sosial dan politik di negara tersebut. Kekerasan dan diskriminasi terhadap umat Islam di India menunjukkan bahwa Islamofobia bukan hanya masalah sosial, tetapi juga menjadi alat politik yang digunakan untuk memperkuat identitas agama Hindu dan mengesampingkan kelompok minoritas terutama umat Islam. (Damayanti et al. 2022)

Oleh Karena itu, islamophobia di India semakin menguat seiring dengan semakin berkembangnya ideologi Hindutva, yang dipromosikan oleh kelompok nasionalis Hindu seperti Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) sejak 1925. Ideologi ini, yang menekankan identitas Hindu sebagai dasar bangsa, berusaha untuk mengubah India menjadi negara Hindu dan mengikis prinsip sekuler yang menjadi landasan negara India. Meskipun India pada awalnya dikenal dengan ideologi Nehruvian yang menganut prinsip republik demokratik sosialis sekuler, pada 1990-an, dengan kebangkitan BJP (Bharatiya Janata Party) yang berkuasa, Islamophobia mulai mendapat momentum besar. Melalui serangkaian "Rath Yatras" atau prosesi kereta yang berorientasi pada kekuatan Hindu, BJP berhasil membangun solidaritas massa Hindu dengan menekankan superioritas agama mereka. Pada 1992, puncaknya adalah penghancuran Masjid Babri di Uttar Pradesh oleh massa yang didorong oleh narasi Hindutva, yang menuntut pembangunan kuil Hindu di atas tempat yang mereka klaim sebagai kelahiran Dewa Rama. Tindakan ini memperburuk ketegangan agama dan menumbuhkan kekerasan terhadap Muslim di seluruh India, dengan menyebarkan kebencian terhadap minoritas Muslim dan menganggap mereka sebagai ancaman terhadap identitas Hindu. Langkah-langkah ini memperburuk keadaan sosial di India, karena polarisasi agama semakin tajam dan diskriminasi terhadap Muslim semakin meluas, memunculkan ketidakstabilan sosial yang berlarut-larut. Diskriminasi ini menciptakan ketegangan di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan kehidupan sosial, di mana umat Hindu cenderung diberi perlakuan istimewa, sementara Muslim sering menjadi sasaran kebijakan diskriminatif yang merugikan hak-hak mereka sebagai warga negara India. (Mukarram 2024)

Kesimpulan

Kebijakan - kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Narendra Modi, terutama yang dipengaruhi oleh ideologi Hindutva, telah menimbulkan dampak signifikan terhadap minoritas Muslim di India. Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA), pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir, serta kebijakan yang diskriminatif dalam sektor pendidikan dan ekonomi, menciptakan ketidaksetaraan dan polarisasi sosial. Ideologi Hindutva semakin memperburuk diskriminasi terhadap umat Islam dengan mengedepankan nasionalisme Hindu yang eksklusif, mengancam prinsip sekularisme yang menjadi dasar konstitusi India. Selain itu, meningkatnya Islamofobia yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan tersebut dan

dipropagandakan oleh kelompok ekstrimis Hindu, memperburuk hubungan antaragama, menyebabkan kekerasan, dan menciptakan ketegangan sosial berupa Bangladesh yang memusuhi india/membela minoritas muslim di India. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan ancaman serius terhadap pluralisme dan keragaman sosial di India, serta merusak fondasi demokrasi yang didasarkan pada kesetaraan dan inklusivitas.

Daftar Rujukan

- Asy'ari, Nahla Wahdatan Nasrah. 2024. "Pengaruh Hindutva Dalam Kebijakan Pemerintahan India Terkait Persoalan Imigran Muslim (Studi Kasus Amandemen UU Kewarganegaraan Tahun 2019), Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, 2021." *Ayan* 15(1):37–48.
- Az-zahra, Alifiya Faiha. 2022. "Peran Organisasi Kerjasama Islam (Oki) Dalam Menangani Konflik Di." 4(2):0–15.
- Damayanti, Angel, Verdinand Robertua, and Darynaufal Mulyaman. 2022. *Islamofobia Di Indo Pasifik: Akar Permasalahan, Dampak Terhadap Keamanan, Dan Strategi Penanggulangan*.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. 2021. *Asal Usul Kajian Ketatanegaraan*.
- Islam, Monirul. 2024. "Socio-Economy and Educational Status of Muslims in India : An Overview." 13(2231):439–45.
- Jha, S. 2020. "Citizenship Amendment Act and the Crisis of Indian Secularism." *Economic and Political Weekly*, 55." (July):1–8.
- Kaur, R. 2014. "The Scrapping of Article 370 and Its Implications for Kashmir." *Journal of South Asian Studies*, 42." 33–48.
- Khan. 2015. "Police Brutality and the Suppression of Muslim Protests in India." *South Asian Journal of Human Rights*, 12." 6.
- Mahanun. 2016. "Tinjauan Pustaka, ALACRITY : Journal Of Education, Vol. 1, No. 2, Tahun. 2021,," 1–23.
- Moordiningsih. 2015. "Islamophobia Dan Strategi Mengatasinya." *Buletin Psikologi* 12(2):73–84.
- Mukarram, Hasyim Asy'arie. 2024. "Analisis Kebijakan Pemerintah India Dalam Isu Islamophobia: Studi Kasus Di India Tahun 2020-2022, Tahun. 2024, Hal. 16-17." *Ayan* 15(1):37–48.
- Nahla Wahdatan Nasrah Asy'ari. 2023. "Ideologi Nasionalisme Hindu Dalam Politik Pemerintahan Modi, Program Studi Hubungan Internasional,

Universitas Islam Indonesia, Halaman 1.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I):1–19.

Sukma, Feby Melati, and Muh. Asy’ari. 2024. “Pengaruh Gerakan Hindutva Terhadap Hubungan Bilateral India-Pakistan Era Kepemimpinan Narendra Modi (2014-2022).” *JILS (Journal of International and Local Studies)* 8(1):10–23. doi: 10.56326/jils.v8i1.3485.